



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

Jalan Letnan Jendral Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu) Pontianak 78121

Website : www.disnaker.pontianak.go.id E-Mail : dinastenagakerjakotapontianak@gmail.com



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja Perubahan-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Perubahan-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

- 1. Persiapan Penyusunan Renja-PD**

Melalui tahapan ini persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD, orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi.

- 2. Penyusunan rancangan Renja-PD.**

Pada tahapan ini penyusunan rancangan diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja-PD yang mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil

evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Ranwal Renja-PD dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

3. Penetapan Renja-PD.

Tahapan ini dimana penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan Renja-PD oleh Kepala Daerah sebagai pedoman dalam Menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 memuat berbagai program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja utama;
- b) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja renstra;
- c) Program dan kegiatan harus mendukung Visi, Misi Walikota Pontianak.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227.)
 21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 4).
 22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 15.1).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA PERUBAHAN pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*Outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*Output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja yaitu, dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja sub kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

TABEL. II.I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA s/d TRIWULAN I TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026	TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN					
				TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023		TING- KAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		

					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	58	%			52	%	13,16	%	13,16 %	54%	4,49%	7,74%		
					Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100	%			52	%	0	%	0%	100%	17,95%	17,95%		
					Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	780	Oran g			30	orang	0	orang	0%	230	Orang	56	Orang	7,17%
					Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	43	Lem baga			0	0	0	0o	0%	40	Lemb aga	0	Lemba ga	0
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	100	%			100	%	26,32	%	26,32 %	100%	0%			0
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	43	Lem baga			38	lemba ga	10	lembag a	26,32%	40	Lemb aga	0	Lemba ga	0
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran	100	%			0	0	0	0	0	100%	0%			0

						<i>Kota</i>														
					Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	21	Lembaga			0	0	0	0	0	5	Lembaga	0	Lembaga	0
					Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	9	Lembaga			0	0	0	0	0	5	Lembaga	0	Lembaga	0
					<i>Pengelolaan informasi pasar kerja</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja</i>	100	%			100	%	100	%	0	100	%	0	%	0
					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1	Dokumen			0	0	0	0	0	1	Dokumen	0	Dokumen	0
					Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	1.800	Orang			0	0	0	0	0	400	Orang	0	Orang	0
					Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	3.000	Orang			30	orang	30	orang	100%	800	Orang	0	Orang	0
					<i>Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota</i>	100	%			0	0	0	0	0	100	%	0	100%	0

					Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	60	Orang			0	0	0	0	0	15	Orang	0	Orang	0
					Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	10	Orang			0	0	0	0	0	4	Orang	0	Orang	0
					Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	36	Orang			0	0	0	0	0	10	Orang	0	Orang	0
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	57	%			100	%	28,33	%	28,33 %	55	%	0,02	%	0,02
					<i>Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota</i>	100	%			0	0	0	0	0	100	%	0	%	0
					Pengesahan peraturan perusahaan	Jumlah perusahaan yang	150	Peru			0	0	0	0	0	40	Perusa	0	Perusa	0

					bagi perusahaan	melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online		saha an								haan		haan		
					Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	100	Peru saha an			0	0	0	0	0	20	Perusa haan	0	Perusa haan	0
					Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4	Lapo ran			0	0	0	0	0	4	Lapor an	0	Lapor an	0
					<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100	%			100	%	28,33	%	28,33 %	100	%	3,29	%	3,29
					Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	30	Perk ara			0	0	0	0	0	12	Perkar a	0	Perkar a	0

					Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	84	Perkara			30	perkara	7	Perkara		30	Perkara	0	Perkara	0
					Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	6	Asosiasi & Serikat Pekerja			0	0	0	0	0	4	Asosiasi & Serikat Pekerja	0	Asosiasi & Serikat Pekerja	0
					Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga			9	lembaga	3	lembaga		1	Lembaga	1	Lembaga	100
					Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	9000	Orang			0	0	0	0	0	3000	Orang	0	Orang	0
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayananan kesektarian	95	%			95	%	50	%	50%	95	%	10,90	%	11,47
					<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	%			0	0	0	0	0	100%	0%			0

					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen			0	0	0	0	0	15	Dokumen	0	Dokumen	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Laporan			0	0	0	0	0	6	Laporan	0	Laporan	0
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan			0	0	0	0	0	9	Laporan	09	Laporan	100
					<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	%			100	%	25	%	0	100%	23,53%		23,53	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	23	Orang / Bulan			12	bulan	12	bulan	100%	23	Orang / Bulan	18	Orang/ Bulan	78,26
					Pelaksanaan Penanatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	Dokumen			12	bulan	12	bulan	100%	5	Dokumen	1	Dokumen	20

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12	Lapo ran			0	0	0	0	0	12	Lapor an	3	Lapor an	25%
					<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100	%			0	0	0	0	0	100	%	0	%	0
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	3	Pake t			0	0	0	0	0	3	Paket	0	Paket	0
					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	Oran g			0	0	0	0	0	8	Orang	0	Orang	0
					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</i>	100	%			100	%	100	100%	0%	100%		16,67%		16,67%
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan.	2	Pake t			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	0	Paket	0
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan.	2	Pake t			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	1	Paket	50%

					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	2	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	1	Paket	50%
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	4	Paket	1	Paket	25%
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	1	Paket	50%
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan			12	bulan	12	bulan	100%	12	Laporan	0	Laporan	0
					<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	%			100	%	100	%	100%	100%	0%	0		
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	17	Unit			12	bulan	12	bulan	100%	5	Unit	0	Unit	0
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	16	Unit			12	bulan	12	bulan	100%	4	Unit	0	Unit	0
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	18	Unit			12	bulan	12	bulan	100%	4	Unit	0	Unit	0

					<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	%			100	%	100	%	100%	100,00%		16,67%		16,67
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan			12	bulan	12	bulan	100%	12	Laporan	3	Laporan	25%
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.	12	Laporan			12	bulan	12	bulan	100%	12	Laporan			
					Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan			0	0	0	0	100%	12	Laporan	0	Laporan	0%
					<i>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100	%			100	%	100	%	100%	100%		19,44%		19,44%
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1	Unit			0	0	0	0	0%	1	Unit	1	Unit	100
					Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	Unit			0	0	0	0	0%	8	Unit	0	Unit	0
					Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah peralatan dan mesin	28	Unit			12	bulan	12	bulan	0%	18	Unit	5	Unit	62,5%

					Mesin lainnya	lainnya yang dipelihara														
					Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit			0	0	0	0	0%	1	Unit	1	Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menempati gedung terpadu Kota Pontianak yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 1 Pontianak, yang menyatu dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak.

Dalam hal tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Pengukuran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s.d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s.d < 85 : Berhasil
3. 55 s.d < 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s.d < 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing.

Tabel. II.II
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-		8,35 – 10,25	8,20 – 10,20	8,15-10,15	8,92	8,29	-	-	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	-		156.400.000	160.109.000	155.418.000	14,60-	19,93	-	-	
3	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	-	-		65 %	67 %	69%	-		-	-	
4	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-		54 %	56 %	58%	52 %		-	-	
5	Presentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi	-	-		10 %	15 %	20%	68 %		-	-	
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	-		55 %	56 %	57%	61,46	38,88	-	-	
7	Tingkat Kepuasan bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	-		95 %	95 %	100	95 %	95%	-	-	
8	Presentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacuh kerencana tenaga kerja		√		-	-		100	76,19	-	-	

9	Presentase Tenaga kerja bersertifikat kompetensi		√		-	-		2,11	10,86		-	
10	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelolah yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		√		-	-		100	66,12	-	-	
11	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan atar kerja dalam wilayah kabupaten (Kota)		√		10 %	15 %		50,57	27,43	-	-	

Pencapaian kinerja pelayanan terdapat sebelas indikator penilaian dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target Tahun 2024 sebesar 8,35 – 10,25 dan target Tahun 2025 sebesar 8,20 – 10,20, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target Tahun 2024 sebesar 156.400.000 dan target Tahun 2025 sebesar 160.109.000, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja dengan target Tahun 2024 sebesar 65 % dan target Tahun 2025 sebesar 67 %, Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi dengan target Tahun 2024 sebesar 54 % dan target Tahun 2025 sebesar 56 %, Presentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi dengan target Tahun 2024 sebesar 10 % dan target Tahun 2025 sebesar 15 %, Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) target Tahun 2024 sebesar 55 % dan target Tahun 2025 sebesar 56 %, Tingkat Kepuasan bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan target Tahun 2024 sebesar 95 % dan target Tahun 2025 sebesar 95 %, Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan atar kerja dalam wilayah kabupaten (Kota) dengan target Tahun 2024 sebesar 10 % dan target Tahun 2025 sebesar 15 %.

Dikarenakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tidak mengampu SPM, maka Pencapaian Kinerja Pelayanan NIHIL.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen penikmat layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat. Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang keterkaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan wewenang.

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak antara lain adalah :

- 1. Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi isu penting karena berdampak pada daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah
- 2. Kesempatan Kerja
Terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya angka pengangguran menjadi tantangan utama yang perlu diatasi
- 3. Perlindungan Tenaga Kerja
Perlindungan tenaga kerja,terutama terhadap pekerja migran,menjadi isu strategis Yang memerlukan perhatian khusus

Tabel II.III
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas Tenaga Kerja yang rendah	Produktivitas yang rendah	Pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai
2	Perselisihan Hubungan Industrial	Konflik antara pekerja dan pengusaha	Komunikasi yang buruk antara pekerja dan pengusaha serta kurangnya partisipasi serikat buruh

3	Angka Pengangguran terbuka masih tinggi	Masih banyaknya pengangguran	Ketidakseimbangan Antara Pertumbuhan Penduduk dan Lapangan Kerja
---	---	------------------------------	--

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program prioritas pembangunan Kota Pontianak merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Adapun pagu anggaran/pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak meliputi belanja langsung yang meliputi komponen belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Belanja langsung meliputi kegiatan rutin penunjang Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan termasuk belanja kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan usulan/rencana kerja kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Tabel II.IV											
Review Rencana Kerja Terhadap											
Rancangan Awal RKPD Tahun 2025											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
KETENAGAKERJAAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	3.857.746.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	95%	4.180.235.000,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.700.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.700.000,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8.200.000,00	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8.200.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.700.000,00	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.800.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.800.000,00	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.151.446.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.473.935.000,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	2.886.746.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	3.209.235.000,00	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	260.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	260.000.000,00	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4.700.000,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	100%	61.200.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	100%	61.200.000,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	43.200.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	43.200.000,00	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	18.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	18.000.000,00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	334.300.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	334.300.000,00	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4.300.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4.300.000,00	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	65.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	65.000.000,00	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	40.000.000,00	

1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	62.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	62.000.000,00	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	38.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	38.000.000,00	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	125.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	125.000.000,00	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	111.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	111.000.000,00	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	7 Unit	33.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	14 Unit	33.000.000,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	40.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	40.000.000,00	
1.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	38.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	38.000.000,00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	78.600.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	78.600.000,00	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.600.000,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	52.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	52.000.000,00	
1.6.3	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	24.000.000,00	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	24.000.000,00	

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	105.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100%	105.500.000,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38.000.000,00	
1.7.2	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	14.000.000,00	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	14.000.000,00	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 Unit	32.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 Unit	32.000.000,00	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	21.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	21.500.000,00	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)		TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	67%	52.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)	Kota Pontianak	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	67%	52.000.000,00	
2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	52.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pontianak	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	52.000.000,00	
2.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	24.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	24.000.000,00	
2.2.2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	30 Perusahaan	28.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	30 Perusahaan	28.000.000,00	
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	56%	575.000.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Pontianak	BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	56%	617.000.000,00	
3.1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	470.000.000,00	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pontianak	Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	520.000.000,00	

3.1.1	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	260 Orang	450.000.000,00	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	260 Orang	500.000.000,00	
3.1.2	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	20.000.000,00	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	20.000.000,00	
3.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	100%	50.000.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta	100%	50.000.000,00	
3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	42 Lembaga	50.000.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	42 Lembaga	50.000.000,00	
3.3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%	17.000.000,00	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%	17.000.000,00	
3.3.1	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	15 Perizinan	17.000.000,00	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	15 Perizinan	17.000.000,00	
3.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	20.000.000,00	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	18.000.000,00	
3.4.1	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	20.000.000,00	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	18.000.000,00	
3.5	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	100%	18.000.000,00	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	100%	12.000.000,00	
3.5.1	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	18.000.000,00	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	12.000.000,00	

4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI	15%	383.000.000,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Pontianak	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI	15%	441.000.000,0 0	
4.1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	119.000.000,00	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	188.000.000,0 0	
4.1.1	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	3 Orang	24.000.000,00	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	3 Orang	20.000.000,00	
4.1.2	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	300 Orang	24.000.000,00	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	300 Orang	20.000.000,00	
4.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	170 Orang	34.000.000,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	170 Orang	30.000.000,00	
4.1.4	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	17.000.000,00	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	100.000.000,0 0	
4.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	130 Orang	20.000.000,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pontianak	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	130 Orang	18.000.000,00	
4.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	29.000.000,00	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	29.000.000,00	
4.2.1	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	7 Lembaga	14.000.000,00	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	7 Lembaga	14.000.000,00	

4.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	7 Lembaga	15.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	7 Lembaga	15.000.000,00	
4.3	Pengelolaan informasi pasar kerja		Jumlah kegiatan	100%	196.000.000,00	Pengelolaan informasi pasar kerja	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan	100%	185.000.000,00	
4.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	12.000.000,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	12.000.000,00	
4.3.2	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	600 Orang	22.000.000,00	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	600 Orang	22.000.000,00	
4.3.3	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1000 Orang	162.000.000,00	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1000 Orang	151.000.000,00	
4.4	Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota		Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	100%	39.000.000,00	Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	100%	39.000.000,00	
4.4.1	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	15.000.000,00	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	15.000.000,00	
4.4.2	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	3 Orang	10.000.000,00	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	3 Orang	10.000.000,00	
4.4.3	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	12 Orang	14.000.000,00	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	12 Orang	14.000.000,00	
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	56%	365.000.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Pontianak	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	56%	365.000.000,00	
5.1	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah		Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya	100%	82.000.000,00	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu]	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang	100%	82.000.000,00	

			beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota			daerah		hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota			
5.1.1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	22.000.000,00	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	22.000.000,00	
5.1.2	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	40 Perusahaan	40.000.000,00	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	40 Perusahaan	40.000.000,00	
5.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	20.000.000,00	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	20.000.000,00	
5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	283.000.000,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	283.000.000,00	
5.2.1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perselisihan yang dicegah	10 Perkara	20.000.000,00	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perselisihan yang dicegah	10 Perkara	20.000.000,00	
5.2.2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	28 Perkara	20.000.000,00	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	28 Perkara	20.000.000,00	

5.2.3	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	5 Asosiasi & Serikat Pekerja	14.000.000,00	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	5 Asosiasi & Serikat Pekerja	14.000.000,00	
5.2.4	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten /Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	204.000.000,00	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	204.000.000,00	
5.2.5	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang	25.000.000,00	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang	25.000.000,00	

Jumlah Program : 5

Jumlah Kegiatan : 18

Jumlah Sub Kegiatan : 48

Jumlah anggaran hasil dari analisis kebutuhan : Rp. 5.655.235.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Perubaahn Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Mempedomani RPD Kota Pontianak Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam penyusunan rencana kerja perubahan, dengan memperhatikan nomenklatur sub-kegiatan dengan indikator kinerjanya. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 mencakup rencana kerja sebanyak 5 program, 18 kegiatan, dan 48 sub-kegiatan. Terkait pendanaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan penyesuaian terkait sumber dana, menjadi Dana Bagi Hasil, terkecuali untuk sub-kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, gaji ASN bersumber pada Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, sedangkan tunjangan ASN bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.345.326.237,-. Adapun rincian Rumusan Rancana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pontianak tabel IV.I berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DINAS TENAGA KERJA				5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	-	-	-	4.500.473.000,00	4.693.108.203,00	4.656.261.837,00							4.236.946.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	30.700.000,00	34.038.000,00	29.614.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		16.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	15	4	23.200.000,00	29.614.000,00	29.614.000,00	Kota Pontianak,	Dana Bagi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Terciptanya Pembangunan			8.400.000,00	DINAS TENAGA

		Daerah	Dokumen	Dokumen				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil (DBH)	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				KERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	4.700.000,00	2.124.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	2.800.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.779.173.000,00	3.962.149.803,00	3.969.629.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		3.191.246.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23 Orang/bula	23 Orang/bul	3.514.473.000,00	3.662.892.603,00	3.671.872.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan			2.915.946.000,00	DINAS TENAGA

		Tunjangan ASN	n	an				Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				KERJA
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	260.000.000,00	299.257.200,00	297.757.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			270.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.700.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	61.200.000,00	32.680.000,00	26.500.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	43.200.000,00	32.680.000,00	26.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

								Kel/Desa		kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	334.300.000,00	239.828.100,00	228.285.337,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		404.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.300.000,00	12.006.600,00	12.006.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	65.000.000,00	53.869.300,00	74.426.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai			74.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

								Kel/Desa		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	23.038.200,00	23.038.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	62.000.000,00	33.830.000,00	33.830.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			77.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.000.000,00	37.084.000,00	37.084.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			72.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	80.000.000,00	47.900.237,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

										perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	111.000.000,00	261.315.600,00	255.036.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		268.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	33.000.000,00	89.979.900,00	87.349.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	160.814.300,00	157.165.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	38.000.000,00	10.521.400,00	10.521.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			68.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

										penyangang disabilitas.					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	78.600.000,00	24.223.700,00	20.323.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		103.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			3.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	15.600.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	2.623.700,00	5.323.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	105.500.000,00	138.873.000,00	126.873.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		159.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	38.750.000,00	26.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemeliharaan Mebel														
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	32.000.000,00	55.280.000,00	55.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	21.500.000,00	44.843.000,00	44.843.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67 Persen	67 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00							38.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 Persen	100 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Orang	30 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-	692.000.000,00	742.000.000,00	670.566.000,00							597.000.000,00	

	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100 Persen	100 Persen	595.000.000,00	645.000.000,00	636.166.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyaraka t Kota Pontianak		478.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	270 Orang	270 Orang	575.000.000,00	625.000.000,00	622.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	42 Lembaga	42 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	14.066.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	34.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	65 Lembaga	65 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	34.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	15 Perizinan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	100 Persen	100 Persen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														

		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaann	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	56 Persen	56 Persen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	-	390.000.000,00	340.953.800,00	279.955.000,00							391.000.000,00	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	188.000.000,00	136.000.000,00	96.955.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		139.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														

		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelayanan antar Kerja														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	170 Orang	170 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	18.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Perluasan Kesempatan Kerja														

		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	130 Orang	130 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	10.105.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 Persen	100 Persen	173.000.000,00	172.953.800,00	151.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		204.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	600 Orang	600 Orang	22.000.000,00	21.953.800,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Job Fair/Bursa Kerja														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1000 Orang	151.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			178.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	29.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		48.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12 Orang	12 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	365.000.000,00	806.081.800,00	721.903.400,00							401.000.000,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	-	-	-	82.000.000,00	114.801.600,00	96.132.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Kabupaten/Kota														
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	30 Perusahaa n	22.000.000,00	30.581.400,00	27.246.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	40 Perusahaan	10 Perusahaa n	40.000.000,00	24.774.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	59.446.000,00	68.886.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	283.000.000,00	691.280.200,00	625.771.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		317.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	28 Perkara	20.000.000,00	47.057.000,00	32.057.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	28 Perkara	28 Perkara	20.000.000,00	44.945.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.000.000,00	5.564.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	11 Lembaga	204.000.000,00	146.982.000,00	146.982.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3000 Orang	6230 Orang	25.000.000,00	446.732.000,00	446.732.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H				5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	

Jumlah Program : 5 Program

Jumlah Kegiatan : 18 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 48 Sub kegiatan

Jumlah anggaran : Rp. 6.345.326.237,-

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Pontianak tahun 2024-2026 serta Indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi batu loncatan pada tujuan dan sasaran RPJMD. Maka dari itu, setiap Perangkat Daerah harus menetapkan parameter kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya, yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi sebagai syarat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Dokumen Renja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi patokan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak di dalam pelaksanaan kinerja dan pembangunan satu tahun ke depan.

Pontianak, 20 Juni 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak,



ISMAIL ABDURRAHMAN, SH. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19670704 199403 1 019